

ARTIKEL

Kewenangan Pengawasan DPR melalui hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Terdapat 3 fungsi DPR:

Menurut Pasal 20 A ayat 1 UUD NRI yang salah satunya adalah fungsi pengawasan dalam menjalankan fungsinya DPR mempunyai hak angket yaitu hak untuk menyelidiki kebijakan undang-undang dan kebijakan pemerintah oleh karena itu peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan pengawasan DPR melalui hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan histori. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif.

Sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: bahwa, fungsi pengawasan yang dimiliki DPR merupakan wujud dari sistem *check and balances* antara legislative dan eksekutif, disisi lain fungsi pengawasan yang dimiliki DPR adalah untuk mengevaluasi, mengkoreksi suatu pekerjaan agar tercapainya maksud dan tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut DPR memiliki hak, yang salah satunya adalah hak angket, hak angket adalah hak untuk melakukan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak angket yang dimiliki oleh DPR bukan hak menyelidiki sebagaimana penyelidikan pro justitia seperti penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan namun penyelidikan dalam hal ini adalah penyelidikan pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah.

ABSTRACT

The supervisory authority of the house of Representatives came right now Indonesia's attempt in the system there are 3 functions of the house of Representatives:

According to article 20 paragraph 1 of the Constitution is A NRI, one of which is a function of oversight function in running the house of Representatives has the right now that is the right to delve into policy legislation and Government policies therefore researchers take the outline of the problem that is how the house oversight authority through the right now Indonesia's attempt in the system.

This research is normative, approach to legal research using research approaches to legislation, a conceptual approach, and the approach to history. Types of data used are secondary data with primary and secondary legal materials, engineering data collection form the study of librarianship and techniques of data analysis used the deductive in nature.

So the obtained research results as follows: that the functions of supervision, the house was owned by the existence of a system of checks and balances between the legislative and executive oversight function on the other hand, owned the house is to evaluate, corrects an occupation in

order to achieve the aims and objectives set according to plan so that the pace is good governance.

In running the House Representatives of has the right functions, one of which is a right now, right now is the right to perform against the implementation of the legislation or Government policy with regard to important strategic and far-reaching impact on the life of society, nation and State are allegedly contrary to the Act.

Then it can be drawn the conclusion that the rights now owned by the house of Representatives is not a right to investigate as the investigation pro Lady Justice like the investigation conducted by the police and the Prosecutor's Office but the investigation in this case is an investigation the implementation of legislation and Government policy.

